



Penilaian Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Di Indonesia

Mutia Kardina ¹⁾, Aldri Frinaldi ²⁾, Asnil, Nora Eka Putri ³⁾

^{1,2,3)} Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Email: imutiakardina@gmail.com ¹⁾, aldri@fis.unp.ac.id ²⁾, asnilmelayu@gmail.com,
noraekaputri@fis.unp.ac.id ³⁾

ARTICLE HISTORY

Received [25 Oktober 2024]

Revised [27 November 2024]

Accepted [03 Desember 2024]

KEYWORDS

Impact, Performance, Public Services, Financial Management, Information Technology.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan dampaknya terhadap kinerja pelayanan publik di Indonesia. Latar belakang penelitian ini mengacu pada pentingnya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang dapat ditingkatkan melalui penerapan teknologi informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber relevan, termasuk jurnal dan laporan penelitian yang terkait dengan implementasi teknologi informasi dalam sektor publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki dampak positif terhadap kinerja pelayanan publik. Temuan ini mencakup peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, transparansi laporan keuangan, serta kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Namun, tantangan dalam penerapan teknologi informasi masih ada, seperti keterbatasan infrastruktur dan pelatihan sumber daya manusia.

ABSTRACT

This research aims to assess the use of information technology in regional financial management and its impact on public service performance in Indonesia. The background to this research refers to the importance of transparency and efficiency in regional financial management which can be improved through the application of information technology. The research method used is a literature study, which involves collecting and analyzing data from various relevant sources, including journals and research reports related to the implementation of information technology in the public sector. The research results show that the use of information technology in regional financial management has a positive impact on public service performance. These findings include increased efficiency in budget management, transparency of financial reports, and public satisfaction with public services. However, challenges in implementing information technology still exist, such as limited infrastructure and human resource training.

PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan zaman. Berbagai daerah di Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat (Sains, 2018). Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat berakibat pada penurunan kepercayaan kepada pemerintah. Hal ini menjadikan evaluasi terhadap penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat relevan. Penelitian mengenai teknologi informasi di sektor publik menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Sebuah studi oleh Wulandari dan Yulianti (2023) mengungkapkan bahwa penerapan sistem informasi pemerintahan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang transparan berdampak positif terhadap kinerja pelayanan publik. Penerapan teknologi informasi diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pengelolaan data dan informasi keuangan daerah.

Di Indonesia, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah masih memiliki tantangan. Masih terdapat kekurangan dalam infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Hal ini dapat memengaruhi kinerja laporan keuangan yang dihasilkan. Akhmad et al. (2017) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah memiliki dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan teknologi informasi yang optimal diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi yang disajikan kepada masyarakat. Sistem pengendalian internal juga berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengendalian

internal yang baik dapat membantu mencegah penyalahgunaan anggaran dan korupsi. Penelitian oleh Ardianto dan Eforis (2019) menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan yang baik melalui teknologi informasi dan pengendalian internal dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola teknologi informasi juga tidak boleh diabaikan. Sumber daya manusia yang kompeten akan dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. Erawati (2018) menekankan pentingnya pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan kapasitas sumber daya manusia dalam mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai, penerapan teknologi informasi tidak akan memberikan hasil yang optimal. Dampak dari penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat terlihat dalam peningkatan kinerja pelayanan publik. Pengelolaan keuangan yang baik akan memungkinkan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran secara efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah serta dampaknya terhadap kinerja pelayanan publik di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Teknologi informasi berperan sebagai enabler dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif. Penerapan teknologi informasi yang tepat akan memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan analisis data keuangan dengan lebih baik. Hasil analisis yang akurat akan menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran daerah. Pelayanan publik dapat ditingkatkan dan dapat memenuhi harapan masyarakat.

LANDASAN TEORI

Dalam pengelolaan keuangan daerah, penerapan Teknologi Informasi (TI) menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi di sektor pemerintahan tidak hanya mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, tetapi juga memengaruhi kualitas pelayanan publik yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah berdampak pada kinerja pelayanan publik di Indonesia.

Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah mencakup semua proses yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan anggaran daerah. Dengan adanya teknologi informasi, proses ini dapat dilakukan dengan lebih efektif, karena teknologi memfasilitasi integrasi data, meminimalkan kesalahan, dan mempercepat proses administrasi. Menurut teori Good Governance, teknologi informasi berperan penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan prinsip utama dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Beberapa sistem yang sering digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), e-budgeting, dan e-audit (Dwiyanto, 2018).

Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Efisiensi Dan Akuntabilitas

Implementasi teknologi informasi di sektor publik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan akuntabilitas publik. Menurut teori Diffusion of Innovation oleh Rogers (1995), adopsi teknologi baru dapat membawa perubahan positif pada organisasi, terutama dalam hal pengambilan keputusan yang lebih cepat dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Pada konteks pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi dapat mempercepat proses verifikasi anggaran dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan. Hal ini berimplikasi pada efisiensi waktu dan biaya, yang pada akhirnya memengaruhi kinerja pelayanan publik secara keseluruhan (Rogers, 1995).

Dampak Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Pelayanan Publik

Kinerja pelayanan publik diukur dari aspek kualitas, efisiensi, aksesibilitas, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah. Menurut teori Public Service Motivation (PSM), keberhasilan pelayanan publik tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada motivasi dan kapabilitas pegawai dalam menggunakan teknologi tersebut (Perry & Hondeghem, 2008). Pemanfaatan teknologi informasi yang baik memungkinkan pemerintah daerah



untuk menyediakan pelayanan yang lebih responsif dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hubungan Antara Pengelolaan Keuangan Yang Efisien Dan Kinerja Pelayanan Publik

Pengelolaan keuangan yang efisien berdampak langsung pada alokasi sumber daya yang lebih tepat dan efektif, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam teori Resource-Based View (RBV), sumber daya yang dikelola dengan baik akan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dengan adanya teknologi informasi yang mendukung pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui pemanfaatan anggaran yang lebih optimal dan pengendalian biaya yang lebih baik (Barney, 1991).

Teknologi Informasi Dan Transformasi Digital Pemerintahan

Pada era digital, pemerintah dituntut untuk bertransformasi menjadi lebih terbuka, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Teori E-Government menjelaskan bahwa penggunaan teknologi dalam pemerintahan memungkinkan terjadinya reformasi birokrasi dan peningkatan efisiensi pelayanan. Teknologi informasi, seperti sistem e-budgeting dan e-audit, menjadi komponen penting dalam digitalisasi pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang transparan, efektif, dan mudah diakses oleh masyarakat (Heeks, 2001). Transformasi digital ini juga sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang baik dan meningkatkan kepuasan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penilaian penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan dampaknya terhadap kinerja pelayanan publik di Kota medan berfokus pada studi literatur. Penelitian ini akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk jurnal, artikel, dan laporan penelitian sebelumnya yang membahas tentang implementasi teknologi informasi dalam sektor publik, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Pendekatan studi literatur ini akan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif, teori, dan temuan yang ada mengenai hubungan antara penggunaan teknologi informasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini juga akan menggunakan analisis kualitatif untuk menilai dampak penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja pelayanan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dan Implementasi Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah telah menjadi suatu keharusan dalam era digital saat ini. Penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) di Pemerintahan Kota Pariaman menunjukkan betapa teknologi informasi dapat mengoptimalkan proses pengelolaan keuangan. SIMDA memfasilitasi pengolahan data yang lebih cepat dan akurat. Dewi dan Mariska (2018) menemukan bahwa SIMDA meningkatkan efektivitas alokasi anggaran dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran. Penelitian ini menggarisbawahi bagaimana SIMDA menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Binawati dan Nindyaningsih (2022) mengungkapkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi saling berkaitan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak hanya sekadar alat, tetapi juga mempengaruhi kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan. Ketika sistem yang ada didukung oleh sumber daya manusia yang terlatih, kualitas laporan keuangan meningkat secara signifikan.

Penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) di Pemkot Padang juga memberikan gambaran mengenai pengaruh performance expectancy terhadap minat implementasi. Anisa dan Ananda (2019) menyatakan bahwa harapan kinerja yang tinggi dari penggunaan SIPKD mendorong pemerintah daerah untuk menerapkannya secara efektif. Penelitian ini menekankan bahwa sikap positif terhadap teknologi informasi berpengaruh langsung terhadap efektivitas implementasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna yang merasa diuntungkan oleh teknologi informasi cenderung lebih berkomitmen untuk menerapkan sistem tersebut. Inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah juga dapat dilihat dalam pengembangan Government Resource Management System (GRMS) di Pemerintah Kota Surabaya. Fanida dan Niswah (2015) mencatat bahwa GRMS membantu dalam

memberikan layanan publik yang lebih baik dan efisien. Penelitian ini menyoroti bagaimana teknologi informasi tidak hanya memperbaiki proses internal tetapi juga meningkatkan interaksi dengan masyarakat. Implementasi GRMS diharapkan dapat memberikan akses lebih luas kepada publik mengenai informasi keuangan daerah. Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan juga mengharuskan adanya evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi. Teknologi informasi yang digunakan tanpa adanya pemantauan akan kehilangan potensi manfaatnya. Penerapan sistem yang baik membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk manajemen dan staf yang terlibat. Evaluasi yang berkelanjutan membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari sistem yang ada.

Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang diterapkan di Kota Medan merupakan contoh yang jelas tentang bagaimana teknologi dapat diintegrasikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian oleh Nasution dan Si (2021) menunjukkan bahwa meskipun SIPD di Kota Medan telah digunakan, masih terdapat masalah dalam penerapannya. Kualitas sistem yang kurang memadai dan waktu pelatihan yang terbatas membuat banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum sepenuhnya menguasai penggunaan sistem ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana SIPD diterapkan dengan baik. Jika penerapan tidak optimal, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan terpengaruh.

Kompetensi sumber daya manusia juga berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian oleh Lubis dan Shara (2021) mengungkapkan bahwa kompetensi sumber daya manusia di Pemkot Medan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rendahnya kompetensi ini menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi informasi telah diterapkan, jika SDM yang mengoperasikannya tidak memiliki kompetensi yang memadai, hasil yang diharapkan tidak akan tercapai. Kualitas laporan keuangan tergantung pada kemampuan SDM dalam memanfaatkan teknologi yang ada.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi yang efisien dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi. Landau (2018) dalam penelitiannya menyoroti pengaruh penggunaan teknologi informasi dan keahlian pemakai terhadap kualitas informasi akuntansi di SKPD Kota Medan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan intensitas penggunaan teknologi informasi berbanding lurus dengan peningkatan kualitas informasi akuntansi. Kualitas informasi akuntansi yang baik sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan. Hal ini menegaskan pentingnya tidak hanya menerapkan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa pengguna memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengoperasikannya dengan baik.

Evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah juga perlu dilakukan. Penelitian oleh Harahap (2022) menilai bagaimana SIPD digunakan untuk mewujudkan good governance di Kota Medan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi yang didukung oleh teknologi informasi dan perangkat keras yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan yang lebih baik akan tercapai jika pemerintah daerah secara aktif mengevaluasi penggunaan sistem inf

Penggunaan teknologi informasi dapat memberikan dampak positif terhadap transparansi dalam laporan keuangan. Sebuah studi oleh Verasvera (2016) menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah berpengaruh pada perbaikan sistem keuangan dan akuntansi, serta mendukung terciptanya laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Implementasi sistem yang baik dengan dukungan teknologi informasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi keuangan dengan lebih mudah. Hal ini menciptakan akuntabilitas yang lebih besar dari pemerintah daerah kepada warganya.

Pengaruh Kinerja Pengelolaan Keuangan Terhadap Pelayanan Publik

Pengelolaan keuangan yang efektif menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan pelayanan publik. Kinerja pengelolaan keuangan berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut penelitian Alda dan Nasution (2022), kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarikan kepada 35 ASN di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedisiplinan ASN berkontribusi dalam



meningkatkan akurasi dan transparansi laporan keuangan. Ini menjelaskan bahwa kinerja pengelolaan keuangan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Sistem informasi akuntansi juga berperan penting dalam pengelolaan keuangan. Fahri dan Nasution (2021) mengungkapkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi di Kantor Walikota Medan membantu mempercepat proses pengelolaan keuangan. Sistem informasi yang terintegrasi mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dapat berdampak positif terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Analisis rasio keuangan menjadi alat evaluasi penting untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah. Anggi (2022) melakukan analisis terhadap rasio keuangan APBD Kota Medan dari tahun 2016 hingga 2020. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah tergolong tinggi, dengan rasio kemandirian pendapatan yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang kurang efektif dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.

Analisis Value for Money juga memberikan gambaran tentang kinerja pengelolaan keuangan. Harmain, Daulay, dan Enre (2020) menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan metode Value for Money. Penelitian ini menemukan bahwa kinerja keuangan selama periode 2014-2018 belum memenuhi standar ekonomi dan efisiensi. Ketidakmampuan mencapai target pendapatan regional dan peningkatan pengeluaran daerah menjadi faktor penyebabnya. Kinerja yang tidak optimal dalam pengelolaan keuangan ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang baik sangat penting untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Jika pengelolaan keuangan efektif, maka anggaran dapat dialokasikan dengan tepat untuk berbagai program pelayanan publik (Enre, 2020). Masyarakat dapat merasakan manfaat dari pelayanan yang lebih baik dan lebih efisien. Penelitian-penelitian yang telah disebutkan menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan yang baik berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah (Shara, 2018).

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel juga sangat memengaruhi pelayanan publik. Kinerja pengelolaan keuangan yang buruk dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Sebaliknya, pengelolaan keuangan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang efektif adalah kunci untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang optimal (Atika, Junaidi, & Irmadhani, 2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap kinerja pelayanan publik. Penerapan sistem informasi akuntansi yang baik mampu meningkatkan efisiensi proses pengelolaan keuangan, mengurangi kesalahan dalam pelaporan, dan mempercepat akses informasi. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan akurasi dan transparansi laporan keuangan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selain itu, disiplin aparatur sipil negara (ASN) dalam menggunakan teknologi informasi juga berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi teknologi informasi. Meskipun telah dilakukan upaya untuk mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan keuangan, masih terdapat kendala terkait pemahaman dan keterampilan pengguna. Pengelolaan keuangan yang kurang efektif dapat berpengaruh negatif terhadap kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Pemerintah Indonesia harus terus meningkatkan kapasitas ASN melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi terkait teknologi informasi. Pengelolaan keuangan daerah dapat lebih baik dan berdampak positif pada kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, I., Mustanir, A., & Ramadhan, M. R. (2017). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten enrekang. *Sosial Politik & Ekonomi*, 7(1), 89-103.
- Alda, F., & Nasution, J. (2022). Pengaruh Kompetensi ASN, Kedisiplinan ASN, dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Medan (Study Kasus pada BPKAD Kota Medan). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3788-3793.

- Anisa, F., & Ananda, F. (2019). Pengaruh Performance Expectancy Terhadap Minat Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Pemkot Padang. *Jurnal Benefita*, 4(1), 137-145.
- Anggi, A. A. S. (2022). Analisis Rasio Keuangan APBD Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020. *Akuntansi Prima*, 4(1), 104-115.
- Ardianto, R., & Eforis, C. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Bina Akuntansi*, 6(1), 95-136.
- Atika, D., Junaidi, L. D., & Irmadhani, A. (2019). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengalaman Kerja Serta Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Medan. *Warta Dharmawangsa*, 13(4).
- Binawati, E., & Nindyaningsih, C. T. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Optimal*, 19(1), 19-39.
- Dewi, N. C., & Mariska, S. (2018). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintahan Kota Pariaman. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 63-70.
- Enre, D. T. (2020). *Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Fahri, Z., & Nasution, J. (2021). Penerapan sistem informasi akuntansi di bagian umum kantor walikota medan. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 9(2).
- Erawati, T. (2018). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta). *Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 15(1).
- Fanida, E. H., & Niswah, F. (2015). Government Resource Management System (Grms): Inovasi Layanan Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1).
- Harmain, H., Daulay, A. N., & Enre, D. T. (2020). Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2).
- Harahap, M. Z. (2022). *EVALUASI PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Landau, S. N. (2018). *Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi, Keahlian Pemakai dan Intensitas Pemakaian terhadap Kualitas Informasi Akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Lubis, I. T., & Shara, Y. (2021). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Transparansi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 5(3), 144-153.
- Nasution, M. I., & Si, N. M. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109-116.
- Sains, F. S. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *The New Fraud Triangle Model Dengan Perspektif Syariah Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud.* *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(1), 21-46.
- Shara, Y. (2018). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Wulandari, A. D., & Yuliati, A. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 637-649.